



USAID
DARI RAKYAT AMERIKA



**BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA**
BNPB

INFO INVEST DM 2.0



Webinar daring Pertukaran Pengetahuan seri #3 – Pembelajaran dari Bencana (16/12/2021).

Webinar Pertukaran Pengetahuan Pusdiklat PB: Mekanisme Pembelajaran dari Bencana Harus Sistematis, Terintegrasi, Inklusif, dan Dapat Diterapkan

Pembelajaran dianggap berhasil apabila mengarah pada perubahan, tetapi hal ini memerlukan sebuah mekanisme pembelajaran yang mampu menangkap pembelajaran secara sistematis, terintegrasi, dan inklusif. Sesegera mungkin melakukan identifikasi pembelajaran dari sebuah respons bencana merupakan langkah awal yang tepat, tetapi tidak cukup untuk memastikan hasil pembelajaran terintegrasi. Untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas tanggap bencana, pembelajaran tersebut harus diterapkan sehingga akan melahirkan pengetahuan baru. Selanjutnya, pemetikan pembelajaran harus dilakukan secara sistematis untuk proses perbaikan yang terus-menerus dan berkelanjutan. Proses tersebut harus melibatkan semua aktor yang relevan. Apabila hasil pembelajaran ditetapkan sebagai bagian dari kebijakan atau peraturan, maka pembelajaran tersebut dapat membawa perubahan jangka panjang. BNPB dengan dukungan INVEST DM 2.0, akan mengembangkan kerangka kerja untuk mekanisme Pembelajaran dari Bencana di Indonesia.

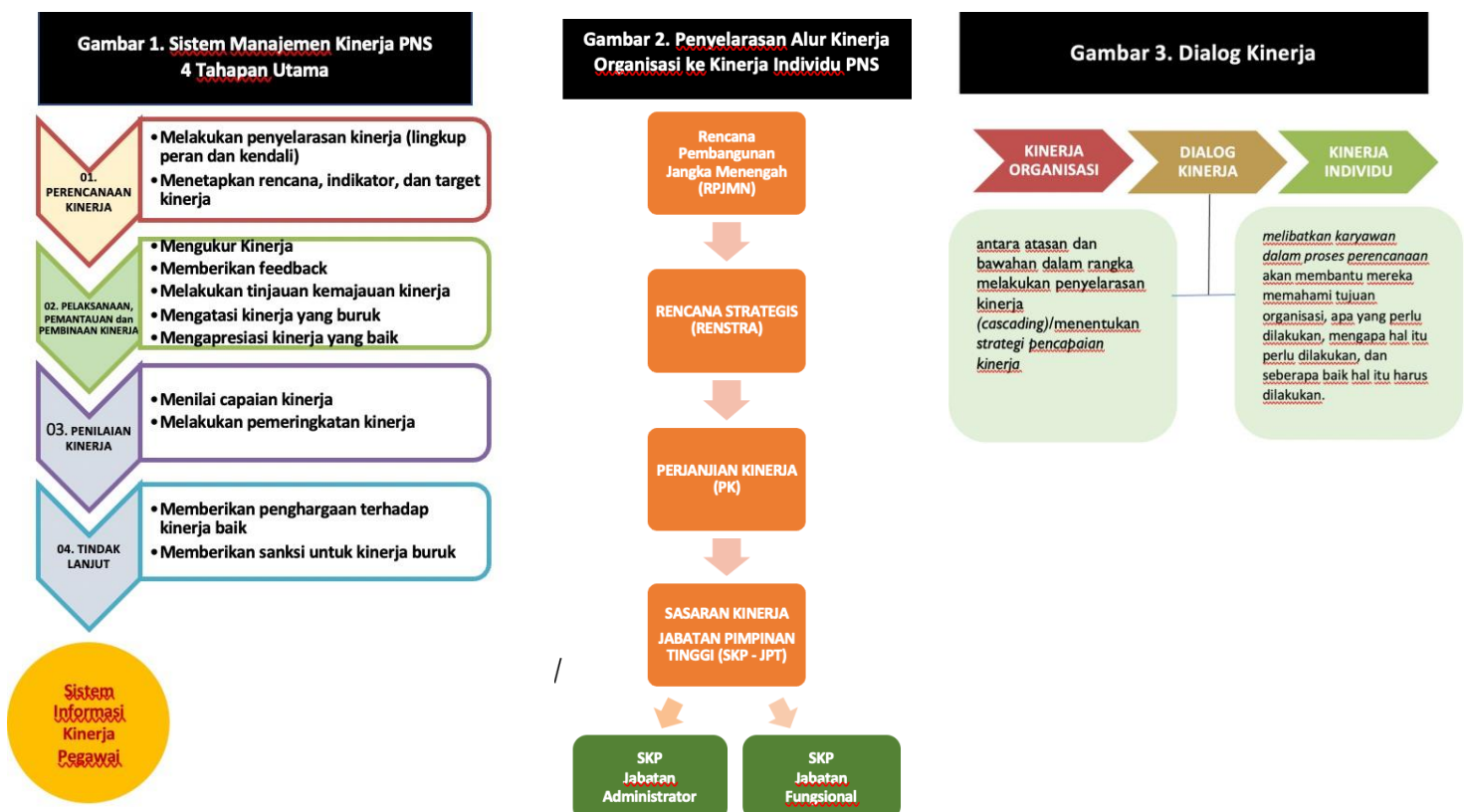
Hal tersebut merupakan ikhtisar dari webinar daring Pertukaran Pengetahuan seri #3 pada 16 Desember 2021, yang diselenggarakan oleh Pusdiklat PB dan INVEST DM 2.0. Hasil dari webinar akan digunakan untuk pengembangan Kerangka Kerja mekanisme Pembelajaran dari Bencana. Webinar yang dipandu oleh Dr. Karl Kim (Direktur Pusat Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Universitas Hawaii/NDPTC) dan dimoderasi oleh Dr. Berton Panjaitan selaku kepala Pusdiklat PB BNPB ini, menghadirkan 5 narasumber dari Amerika Serikat dan Indonesia. Mereka adalah Glen Woodburry, (Direktur Pusat Sekolah Pascasarjana Angkatan Laut untuk Pertahanan dan Keamanan Dalam Negeri, USA); Steve Recca, (Penasihat Program Bantuan Kemanusiaan, Pacific Disaster Center, USA); Prof. Khrisna Pribadi (Bandung Institute Technology ITB dan Forum Perguruan Tinggi untuk PRB); Ignacio Leon-Garcia (Kepala Kantor UN OCHA – Ukraine); dan Ardito Kodijat (Kepala Pusat Informasi Tsunami Samudra Hindia UNESCO-IOC). Webinar dihadiri oleh 115 peserta (42 Perempuan, 73 laki-laki) dari BNPB, BPBD, BPSDM, NGO, media, pribadi, maupun pemerintah daerah.

Steve Recca menekankan untuk tidak hanya berhenti pada identifikasi pembelajaran, tetapi juga menerapkan pembelajaran tersebut baik dalam situasi normal maupun darurat. Prof. Khrisna Pribadi menambahkan bahwa pembelajaran dapat dilakukan di semua tahapan siklus penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi sampai pemulihan. Hal ini juga dapat dilakukan di level individu, komunitas, maupun organisasi. Ignacio menjelaskan pembelajaran harus memiliki dampak yang mendalam di masyarakat, pemerintah, sektor swasta, dan mitra pelaksana. Oleh karena itu, pembelajaran harus menjadi proses terintegrasi dan inklusif. Proses pengintegrasian itu dapat menghasilkan tindakan positif yang memungkinkan kita untuk merespons lebih baik dan lebih siap. Disamping itu, perlu juga dipertimbangkan untuk mengembangkan mekanisme insentif atau disinsentif bagi mereka yang berkontribusi dalam mengurangi atau meningkatkan risiko. Hasil pembelajaran dapat dilaksanakan secara alami atau dapat diperkuat melalui kerangka hukum, kebijakan, atau peraturan perundang-undangan.

Ardito Kodijat memaparkan praktik pembelajaran tentang tsunami di Indonesia dengan mengumpulkan, mendokumentasikan, serta menyediakan akses pada dokumen, surat-surat pemerintah, laporan, klip berita, dan cerita saksi mata tentang tsunami di Indonesia yang terjadi di periode 1945-2004. Salah satu pembelajaran yang didapat menunjukkan bahwa pengetahuan lintas generasi tentang peristiwa tsunami semakin memudar tetapi pengetahuan adat dan pengalaman lokal dapat menjadi sumber berharga untuk pendidikan lokal, kesadaran, dan kesiapsiagaan terhadap bencana tsunami.

Langkah Menuju Organisasi Berkinerja Tinggi: BNPB Mulai Terapkan Sistem Manajemen Kinerja Berbasis Hasil

Peraturan Pemerintah No. 30/2019 Tentang Penilaian Kinerja PNS dan Peraturan MENPANRB No. 8/2021 Tentang Manajemen Kinerja PNS telah mengubah secara fundamental sistem penilaian kinerja PNS dari yang berbasis kegiatan menjadi berbasis hasil. Hal ini sejalan dengan salah satu dari delapan area perubahan dalam program reformasi birokrasi, yakni Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur terkait dengan Penetapan Kinerja Individu. Setiap pegawai diwajibkan untuk menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang diturunkan secara berjenjang dari kinerja organisasi melalui RPJMN, Renstra, dan Perjanjian Kinerja (gambar 2). SKP memuat kinerja utama berikut indikator kinerja individu. Proses penilaian kinerja individu dilakukan melalui proses dialog kinerja yang berbasis hasil dengan memperhatikan kriteria spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, tepat waktu, serta menyesuaikan kondisi internal dan eksternal organisasi (gambar 3).



Melalui Biro SDM dan Umum dengan didukung oleh INVEST DM 2.0, BNPB telah berhasil menyusun Pedoman pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Pedoman ini disusun melalui serangkaian kegiatan diskusi terfokus atau focused group discussion (FGD) untuk menjadi panduan bagi BNPB dalam menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis hasil. Terdapat empat tahapan proses, yakni (1) perencanaan kinerja, (2) pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja, (3) penilaian kinerja, serta (4) tindak lanjut (gambar 1).

Untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya manusia, BNPB telah berhasil membangun sistem aplikasi manajemen kinerja berbasis elektronik (e-performance) melalui pendanaan secara mandiri dengan mengacu pada pedoman manajemen kinerja yang telah dihasilkan bersamadengan program INVEST DM 2.0, sehingga pedoman dan sistem aplikasi bisaberjalan selaras. Sistem manajemen kinerja digital mewajibkan seluruh staf BNPB mengisi SKP dan melakukan dialog kinerja dengan atasan masing-masing melalui e- performance sehingga setiap tahap terdokumentasi dan akan memudahkan pemantauan kemajuan capaian sasaran kinerja dari setiap staf.

Pentingnya Manajemen Kinerja PNS dalam proses transformasi budaya kinerja individu:

01. PENGEMBANGAN KARIR PNS

Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi berdasarkan kinerja.

02. MANAJEMEN TALENTA

Kinerja pegawai harus menjadi salah satu dasar dalam penempatan talent pool.

03. TUNJANGAN KINERJA

Tunjangan kinerja dibayarkan berdasarkan capaian kinerja, tidak lagi hanya berdasarkan kehadiran.

04. PENGHARGAAN

Pemberian penghargaan berdasarkan pada hasil penilaian kinerja yang obyektif dan transparan.

05. SANKSI

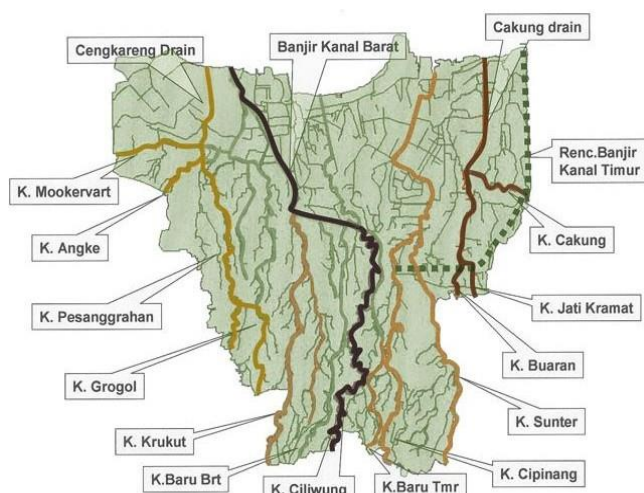
Penilaian kinerja PNS yang tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian



Transformasi budaya kinerja merupakan langkah awal dalam meletakkan landasan yang solid menuju organisasi berkinerja tinggi. Hal ini memerlukan komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh jajaran staf dalam menerapkan pengukuran perilaku kinerja secara 360 derajat serta capaian hasil kinerja. Pedoman pelaksanaan sistem manajemen kinerja yang telah disusun bersama antara Biro SDM dan Umum BNPB dengan program USAID INVEST DM 2.0, akan dapat memberikan panduan bagi seluruh staf dalam melaksanakan tahapan sistem manajemen kinerja PNS

*- Dra. Eny Supartini, MM.,
Kepala Biro SDM dan Umum,
BNPB.*

Perkuat Sistem Kesiapsiagaan Bencana di Tingkat Lokal, BPBD DKI Jakarta Libatkan Lurah sebagai Pengelola Penanggulangan Bencana



Sumber: id.wikipedia.org/wiki/Daftar_sungai_di_Jakarta

Menjadi hilir dari 13 sungai disertai penurunan muka tanah di pesisir, DKI Jakarta kerap dilanda banjir. Situasi ini akan diperparah dengan meningkatnya bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim. Melihat tantangan ke depan ini, penting untuk melakukan mitigasi struktural dan nonstruktural serta memperkuat sistem kesiapsiagaan bencana dan ketangguhan dalam mengantisipasi dan menangani banjir untuk seluruh tingkatan perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta. Guna mendukung pengkoordinasian penanggulangan bencana sebagai upaya pemenuhan mandat Standar Pelayanan Minimal sub-Urusan Bencana Daerah (SPM-PB), khususnya fase tanggap darurat yang lebih cepat dan responsif terhadap kondisi masyarakat setempat, BPBD DKI Jakarta melibatkan lurah dan personil ditingkat kelurahan sebagai *focal point* kebencanaan di wilayahnya.

INVEST DM 2.0 mendukung BPBD DKI Jakarta dalam membuat draft petunjuk teknis terkait dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1245 Tahun 2020 Tentang Penetapan Lurah sebagai Pengelola Penanggulangan Bencana di Wilayah Kelurahan. Menurut Pergub tersebut, Lurah bertugas untuk: 1) Melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana di wilayah rawan bencana; 2) Melaksanakan koordinasi guna mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kelembagaan masyarakat, sektor swasta, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, organisasi kemasyarakatan, relawan kebencanaan, dan masyarakat serta pemeliharaan kearifan lokal guna mengurangi risiko bencana di wilayah kelurahan; 3) Melaksanakan koordinasi guna mengoptimalkan dukungan dari unit kerja pada perangkat daerah atau instansi terkait penanggulangan bencana; 4) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan penanggulangan bencana, dan pemulihan dampak bencana di wilayah kelurahan.

Di dalam Pergub ini juga disebutkan tentang peran BPBD untuk memberikan pendampingan dan pembinaan dalam rangka pengelolaan penanggulangan bencana di wilayah kelurahan.

Lurah bersama jajarannya perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk dapat menjalankan keempat tugas tersebut. Sejalan dengan itu, BNPB dengan dukungan INVEST DM 2.0 tengah menyusun modul untuk pelatihan penanggulangan bencana di kelurahan untuk memenuhi salah satu SPM-PB. Dengan adanya petunjuk teknis dan modul pelatihan ini, diharapkan dapat memberikan pendampingan dan pembinaan untuk pengelolaan penanggulangan bencana di wilayah kelurahan.

Pembelajaran dari Penyusunan Naskah Dinas Petunjuk Teknis Perhitungan Angka Kematian Akibat Bencana

Pusdalops BNPB bersama INVEST DM 2.0 telah menyusun Petunjuk Teknis Perhitungan Angka Kematian Akibat Bencana. Hal ini dilakukan guna memperoleh data angka kematian yang akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat dua pembelajaran penting dipetik dari proses penyusunan tersebut. Pertama, refleksi dan pembelajaran dari proses perhitungan angka kematian akibat bencana yang telah dilakukan sebelumnya dapat membantu mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan menyiapkan alternatif solusi. Kedua, pelibatan kementerian/lembaga teknis, terutama Badan Pusat Statistik (BPS), sejak perencanaan mendukung validitas metode perhitungan yang sesuai dengan kaidah perhitungan statistik. Tentunya, masukan dari BPBD sebagai sasaran pengguna petunjuk teknis juga sangat diperlukan sejak awal proses.



Rapat Pengumpulan Data dan Pembahasan draft I Petunjuk Teknis di Hotel Horison Ultima Bekasi (13/11/2021)

Belajar dari pengalaman menghitung angka kematian akibat bencana di tahun 2020, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, di antaranya adalah sistem pencatatan kematian yang berbeda-beda dan data jumlah penduduk yang berpotensi terpapar bahaya terbatas hanya pada jenis ancaman bencana yang disebabkan oleh fenomena alam, mengikuti dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB). Oleh sebab itu, kegunaan Petunjuk Teknis untuk memberikan penjelasan mengenai rumus perhitungan angka kematian dan menjelaskan batasan kriteria pada masing-masing indikator serta standar yang disepakati, untuk memilah data yang akan masuk dalam perhitungan. Hal ini ditujukan untuk mempermudah perhitungan dan menjaga konsistensi agar dapat dibandingkan baik secara temporal maupun spasial. Perhitungan berdasarkan rancangan petunjuk teknis tersebut juga telah diuji coba melalui simulasi.

Proses penyusunan melibatkan berbagai pihak dari internal maupun kementerian/lembaga terkait. Pihak yang terlibat dari lingkungan BNPB adalah Deputi Sistem dan Strategi, Deputi Kedaruratan, Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, serta Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama. Adapun instansi pemerintahan yang dilibatkan, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, dan Kota Bekasi.



Rapat Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana BNPB dengan BPBD Jakarta (14/09/2021).



Rapat Pengumpulan Data dan Diskusi Rancangan II Petunjuk Teknis Perhitungan Kematian dan Orang Hilang akibat Bencana di Penginapan Jayakarta & Villa Cisarua Bogor (17/11/2021).



Mercy Corps Indonesia



UNIVERSITY
of HAWAII
MANOA

Penafian- Buletin ini terwujud berkat dukungan dari rakyat Amerika melalui The United States Agency for International Development (USAID). Isinya merupakan tanggung jawab program Mercy Corps Indonesia- INVEST DM 2.0 dan tidak mencerminkan pandangan USAID atau Pemerintah Amerika Serikat. Semua foto merupakan dokumentasi INVEST DM 2.0, kecuali di sebutkan sumber lainnya.

INVEST DM 2.0 - Program yang didanai oleh **USAID** ini merupakan kelanjutan dari program **INVEST DM**. Program ini menerapkan pendekatan holistik untuk mendukung pendekatan **BNPB** yang berpusat pada masyarakat, dengan dukungan yang komprehensif dalam kapasitas teknis untuk kesiapsiagaan-respons-pemulihan; kebijakan dan perencanaan; pemerintahan; dan pengembangan organisasi. Area-area ini didasarkan pada sumber daya manusia, yang berfungsi untuk meningkatkan dan memperkuat sumber daya manusia yang berkontribusi pada penanggulangan bencana.

INVEST DM 2.0 adalah konsorsium
Mercy Corps, Mercy Corps Indonesia, dan Universitas Hawaii Manoa

Narahubung
Andrew Duncan
Chief of Party INVEST DM 2.0
aduncan@id.mercycorps.org
Untuk menjaga kualitas program,
berikan kritik dan saran anda melalui

+62 8111 000 381
kritiksaran@id.mercycorps.org
Kami jaga kerahasiaan anda